

PENTINGNYA PERAN PEMIMPIN MEMBANGKITKAN KREATIVITAS MASYARAKAT GUNA PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Oleh:

P. Julius F. Nagel¹⁾

E-mail: juliusnagel@ymail.com

¹⁾Dosen Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala Surabaya

ABSTRACT

Why ethics is important for a nation? The answer, it is closely related to trust, which in turn determines the reputation and integrity of the Nation's leaders. Companies are no longer providing the opportunity for employees to innovate and be creative will be threatened death so that all members of the organization should be encouraged to innovate and creative. Local marketing platform, general market area means an area designed to be able to meet and satisfy the desires and expectations of the target market.

Keywords: *Leader, ethics, integrity, creativity, regional economic development.*

PENDAHULUAN

Integritas dapat disimpulkan secara sederhana sebagai melakukan hal yang benar untuk alasan yang tepat ketika tidak ada orang yang melihat. Saat ini, integritas diyakini merupakan titik terpenting yang memengaruhi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan kestabilan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Apa pentingnya integritas dan etika dalam bisnis? Bagaimana standart moral etika kepemimpinan? Dan bagaimana karakteristik seorang pemimpin? Dikarenakan bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensi, maka sampai kapanpun Indonesia membutuhkan pemimpin yang mempunyai integritas. Pemimpin perlu membangkitkan kreativitas masyarakat guna pengembangan ekonomi daerah.

Permasalahan

Apa pentingnya peran pemimpin? Fungsi-fungsi apa saja yang dilakukan oleh pemimpin? Apa bedanya kreativitas dengan inovasi? Apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi daerah? Bagaimana platform pemasaran daerah?

Landasan Teori

Pemimpin agar beri teladan. Pemimpin harus bisa memberi teladan yang baik bagi rakyatnya. Rakyat seyogyanya juga mendoakan agar pemimpin mereka diberi bimbingan Allah serta diberi kemampuan untuk menjalankan amanah dengan baik. Masyarakat harus

bersikap tulus kepada pemimpin dan sebaliknya pemimpin harus tulus kepada rakyat (Kompas, 1 – 9 – 2011)

Pemimpin bukan bicara, tetapi berbuat. *Managers are people who do things right, while leaders are people who do the right thing.* Itulah kutipan dari buku berjudul *On Becoming Leader* karya ekonom Warren Bennis. Seorang pemimpin bukan orang suruhan, yang melakukan sesuatu dengan baik. Tak diminta pun, pemimpin melakukan hal yang baik. Pemimpin melakukan hal yang baik bukan untuk mendapatkan pujian atau mempertahankan citra dirinya. Jika pada akhirnya orang lain mengakuinya, hal itu adalah buah dari “pohon” hal baik yang sudah ditanamnya selama ini. “Seorang pemimpin bukan hanya butuh kecerdasan intelektual, melainkan juga kecerdasan emosional dan spiritual. Ia harus diuji”. (Kompas, - 27 – 10 - 2011)



Mengapa **Etika** penting bagi sebuah bangsa? Jawabnya, ia berkaitan erat dengan kepercayaan (*trust*), yang pada gilirannya menentukan integritas para pemimpin dan reputasi Bangsa itu. Etika, kepercayaan, dan reputasi (nama baik) adalah 3 sekawan yang tidak terpisahkan. Runtuhnya nama baik seorang tokoh, sebagaimana ambruknya reputasi sebuah organisasi, seringkali terjadi akibat pelanggaran etika. Itu sebabnya mengapa para ahli komunikasi dunia menyarankan, saat hendak mengambil keputusan yang terkait dengan masalah etika, setiap organisasi mesti mengacu pada nilai – nilai dan pandangan yang ada di tengah masyarakat. (Kompas, 22 – 8 – 2011)

Etika, integritas dan moralitas. Tiga hal tersebut menggambarkan komitmen dan konsistensi, serta perilaku yang etis dalam lingkungan kerja. Bahkan di luar tempat kerja, tiga hal tersebut adalah aplikasi dari pengaturan nilai untuk mengambil keputusan sehari-hari dan interaksi dengan tim yang memimpin. Selain itu juga merupakan inti kompetensi yang terkait untuk melindungi kredibilitas pemimpin. (Jennifer Lee dan William Ng., 2010)

Kreatifitas dan inovasi memang mengacu pada dua pengertian yang berbeda, jika kreatifitas berhubungan dengan segala aktifitas yang membangkitkan timbulnya gagasan atau ide baru, maka inovasi lebih ke arah implementasi dari pembangkitan gagasan bisnis yang terus berlangsung sehingga menghasilkan budaya kreatif organisasi. (Adnan, 2002)

Pembangunan ekonomi daerah. Secara umum, **pembangunan ekonomi daerah** adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blackely, 1989 dalam Nagel 2011).

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan disampaikan tujuh butir dasar-dasar ideologis sistem ekonomi Indonesia, yang membentuk nasionalisme ekonomi Indonesia, yaitu:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan “rasa bersama”. Ini dikemukakan oleh Sukarno dan Hatta di depan Sidang BPUPKI tanggal 15 Agustus 1945.
2. Republik Indonesia menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi Kedaulatan Rakyat (*Volkssouvereiniteit*). Namun paham demokrasi Indonesia tidak berdasar pada individualisme konsepsi Rousseau, tetapi berdasar suatu semangat

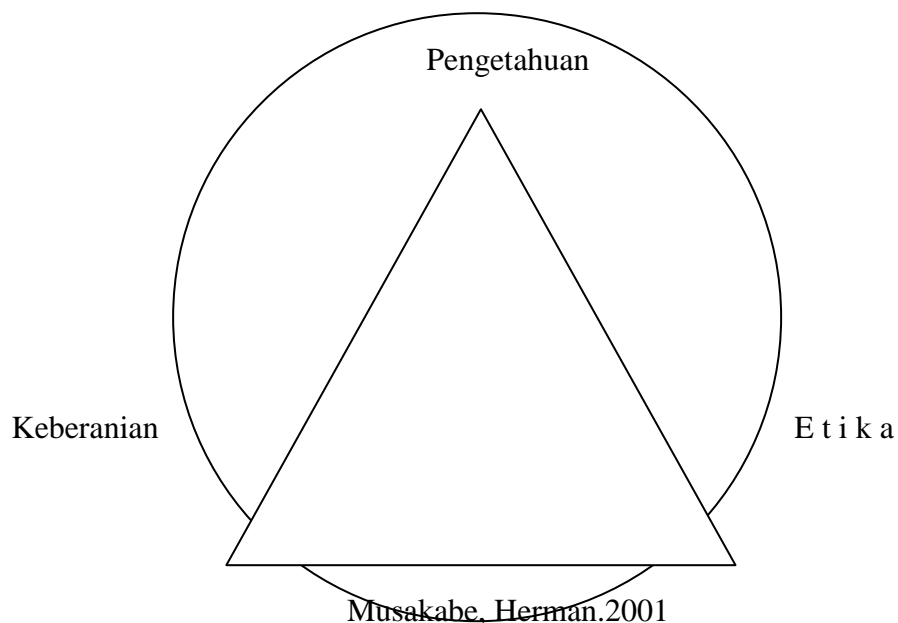
kebangsaan yang timbul sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial, berdasar kebersamaan (*kolektiviteit*)

3. Dalam Pasal 33 UUD 1945 itu tercantum dasar *Demokrasi Ekonomi*, yaitu: ”..... produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat, *kemakmuran masyarakatlah yang utama* bukan kemakmuran orang-seorang.....”, artinya mengutamakan dasar *mutualism*, tidak berdasar *individualism* (meskipun tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena sebagaimana dikemukakan Mohammad Hatta dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 dalam rangka perlunya melindungi pula hak-hak warganegara orang-seorang).
4. Pembangunan Nasional dilakukan untuk mencapai *tujuan nasional*, yaitu: ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...”. dengan kata lain, manusianya (rakyat, bangsa dan Negara-nyalah) yang dibangun. Dengan demikian sebenarnya pembangunan ekonomi adalah derivat dari upaya membangun manusia Indonesia. Pembangunan Nasional adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Orientasi pembangunan yang menempatkan manusia Indonesia dalam posisi sentral ini melahirkan tuntutan konstitusional (Pasal 27 ayat 2, UUD 1945), yaitu: “Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berhak akan pekerjaan artinya *anti pengganguran*. Kehidupan yang layak bagi kemanusiaan artinya *anti kemiskinan*. Dengan demikian Pembangunan Nasional ditujukan untuk membentuk suatu *humane society*. Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945 mengenai hak pekerjaan dan kehidupan rakyat yang layak bagi kemanusiaan akan lebih terancam oleh kebijakan ekonomi yang tidak nasionalistik, yang tidak mengutamakan produksi dalam-negeri dan yang tidak sebesar-besarnya menggunakan bahan-bahan dalam-negeri (*domestic contents*) dalam produksi nasional kita. Sikap konsumtif (*affluent*) yang menggandrungi produk impor (membiarkan produk dalam-negeri tak seimbang bersaing dan tersisihkan) merupakan wujud rendahnya kecerdasan hidup dan lemahnya kesadaran patriotisme Indonesia menambah ancaman ini.
5. Oleh karena itu, sebagai keutuhannya yang paripurna dalam semangat *kebersamaan* dan untuk mencapai suatu *humane society* itu berlakulah ketentuan Pasal 34 UUD 1945, yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
6. Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 berada dalam Bab XIV UUD 1945 yang diberi judul bab “*Kesejahteraan Sosial*”. Dengan kata lain perekonomian nasional Indonesia diurus dan dikelola sebagaimana pun harus berpangkal pada *usaha bersama* (bersama-sama secara langsung melalui pemilikan bersama ataupun tidak langsung melalui keterkaitan usaha-*backward* dan *forward linkages* yang harmonis) dan berujung pada *kesejahteraan sosial* (*societal well-being*), sehingga membentuk suatu kemakmuran bersama (bukan kemakmuran orang-seorang). Judul Bab XIV ini menjadi pesan moral bagi Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang dipayungnya.

7. Pasal 33 UUD 1945 adalah suatu "RAKSASA". Ditetapkannya Pasal 33 UUD 1945 merupakan ujud *Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, yaitu merupakan tekad untuk mengganti asas kolonial, yaitu "asas perorangan", menjadi asas nasional, yaitu "kebersamaan dan asas kekeluargaan" (*mutualism and brotherhood* atau *ukhuwah*). Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 dengan tegas menempatkan *peraturan hukum kolonial* berdasar asas perorangan kedudukan yang *temporer* (Sri-Edi Swasono, 2007).

Menurut Yudhoyono (2001) dalam Musakabe (2001) faktor **pemimpin** dan kepemimpinan merupakan salah satu kunci utama atau salah satu unsur kritis menuju sukses, menuju masa depan Indonesia yang stabil, demokratis, dan sejahtera, menuju Indonesia Raya. Artinya, Indonesia yang luas, besar, kaya raya dan beraneka ragam ini tidak mungkin dikelola secara amatiran, melainkan harus dengan visi dan misi yang jelas serta konsep, strategi dan kebijakan yang benar dan tepat. Adalah suatu keniscayaan apabila hal ini hanya mungkin diwujudkan oleh *pemimpin dan kepemimpinan* yang kuat dan tangguh. Pemimpin yang dapat memotivasi, menggerakkan, mengarahkan dan memberi teladan. Pemimpin yang memiliki etika, integritas moral, kepribadian dan pengabdian yang tinggi. Pemimpin yang mampu tampil ke depan di waktu sulit, tampil membawa pelita di waktu gelap, serta mampu menggugah dan memberi harapan ketika apatisisme dan pesimisme melanda warga masyarakatnya.

Menurut Musakabe (2000) Kualitas moral yang tangguh dan terpercaya harus menjadi landasan keseimbangan antara pengetahuan, keberanian dan etika bagi seorang **pemimpin** agar ia bisa melaksanakan kepemimpinan dan komunikasi sosial secara efektif. Seandainya kita mampu mendapat dan menjaga keseimbangan di antara pengetahuan, keberanian dan etika yang dilandasi oleh keyakinan diri dan kualitas moral maka kita bisa tampil sebagai seorang yang profesional, lebih bertanggung jawab, lebih konseptual dan lebih obyektif. Saya mencoba membuat visualisasi keseimbangan antara pengetahuan, keberanian dan etika yang berlandaskan keyakinan diri dan kualitas moral.



Integritas moral. Integritas sebetulnya berarti keutuhan. Keadaan utuh itu dapat terwujud dengan banyak cara dan dalam banyak konteks. Ada integritas fisik, misalnya kalau tubuh manusia itu lengkap atau "normal". Ada integritas artistik, kalau seniman dalam pekerjaannya semata-mata dituntun oleh pertimbangan kesenian. Ada integritas profesional, kalau si profesional berpegang pada prinsip-prinsip profesinya saja. Demikian juga ada integritas moral.

Tapi integritas moral tidak merupakan suatu macam integritas baru di samping semua integritas lain yang ada. Integritas moral tidak menunjuk kepada suatu aspek terbatas saja. Jika kita berbicara tentang moralitas, kita tidak pernah memaksudkan satu aspek dari serangkaian aspek-aspek lain. Dengan moralitas, kita memaksudkan manusia sebagai manusia, bukan manusia menuntut aspek tertentu saja. Demikian halnya juga dengan integritas moral. Integritas moral adalah integritas manusia sebagai manusia.

Walau begitu, integritas moral kerap bercampur baur dengan integritas jenis lain. Hal itu disebabkan karena moralitas masuk ke dalam tingkah laku manusia menurut segala aspeknya. Misalnya, integritas profesional sering bertemu dengan integritas moral, karena dimensi moral selalu hadir dalam profesi. Suatu kejadian yang beberapa waktu lalu berlangsung di Jakarta dapat diajukan sebagai contoh. Seorang dokter spesialis muda melamar bekerja di rumah sakit swasta. Ia diterima dengan syarat bahwa setiap bulan ia harus sekian banyak kali merujuk pasiennya ke bagian *ultrasonography* (USG). Untuk itu, ia harus menandatangani sebuah perjanjian. Tentu saja, rumah sakit menambahkan syarat tersebut dengan pertimbangan bahwa alat mahal seperti USG itu harus dipakai secara intensif supaya investasi dana akan kembali pada waktunya. Tapi dokter tidak dapat menerima syarat itu karena bertentangan dengan integritas profesional maupun integritas moralnya. Integritas profesional menuntut bahwa ia hanya merujuk pasien yang membutuhkan USG. Targetnya tidak mungkin ditetapkan sebelumnya. Dan integritas moralnya melarang dia untuk memeras pasien dengan membuat rujukan yang tidak perlu. Karena itu, dengan menyesal ia tidak jadi diterima sebagai tenaga medis di rumah sakit tersebut. Bagi dia lebih penting adalah mempertahankan integritas profesional dan moralnya.

Salah satu ciri khas integritas moral adalah koherensi dalam tingkah laku, sehingga semua tindakannya dapat dicocokkan satu sama lain. Tidak ada integritas moral bila perbuatan satu bertentangan dengan perbuatan lain. Di rumah, misalnya, orang berlaku jujur, tetapi ditempat kerja tidak. Atau hari ini ia berbuat begini, besok ia berbuat begitu, dan lusa ia berbuat lain lagi. Koherensi itu harus tampak juga antara perkataan dan perbuatan atau antara prinsip dan perilaku. Orang yang sering menekankan pentingnya keadilan tetapi tidak membayar gaji yang adil kepada karyawannya, dengan jelas tidak mempunyai integritas moral.

Suatu ciri khas lain adalah bahwa integritas moral sebagai sikap moral atau keutamaan (*virtue*) menduduki posisi khusus. Integritas moral tidak mempunyai obyek khusus seperti keutamaan-keutamaan lain. Keberanian, misalnya, mempunyai bahaya sebagai obyeknya. Obyek bagi kemurahan hati adalah urusan harta benda. Integritas moral tidak mempunyai obyek yang membedakannya dari keutamaan-keutamaan lain. Oleh sebab itu dalam jargon ilmu etika, integritas moral disebut *a second order virtue*. Berarti, integritas moral tidak merupakan suatu keutamaan baru, tapi memperkuat keutamaan-keutamaan lain. Integritas moral tidak menyediakan prinsip moral baru, tapi membuat orang dengan konsekuen berpegang pada prinsip-prinsip moral yang ada. (Bertens, K. 2009)

Keberanian moral. Keberanian moral adalah tekad untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban dan tanggung jawab, juga apabila tidak disetujui atau bahkan secara aktif dilawan oleh lingkungan. Keberanian moral adalah ciri watak moral yang kuat. (Magnis-Suseno, Franz, 1996).

Dalam ilmu manajemen terdapat **lima fungsi yang dilakukan pemimpin**. Kelima fungsi itu adalah (Koontz dan Weihrich, 1990 dalam Yuniarto 2000):

- a. Fungsi perencanaan (*planning*), mencakup usaha menseleksi misi dan tujuan dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai misi dan tujuan tadi.
- b. Fungsi pengorganisasian (*organizing*), mencakup usaha identifikasi dan klasifikasi kegiatan-kegiatan, pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, penugasan pada manajer yang mempunyai wewenang tertentu untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan, dan koordinasi baik secara horizontal (dalam level posisi yang sama atau sejenis dalam struktur organisasi) ataupun secara horizontal (dalam level yang tidak sama dalam struktur organisasi).
- c. Fungsi penyusunan personalia (*staffing*), mencakup pengisian dan menjamin kecukupan posisi-posisi dalam struktur organisasi.
- d. Fungsi pengarahan (*leading*), mencakup proses mempengaruhi orang-orang agar mereka berpartisipasi dalam pencapaian tujuan organisasi.
- e. Fungsi pengendalian (*controlling*), mencakup pengukuran dan koreksi prestasi untuk menjamin bahwa tujuan dan rencana organisasi tercapai.

Dalam fungsi pengarahan (*leading*) terdapat satu aspek penting yaitu kepemimpinan (*leadership*). Jika fungsi pengarahan menekankan pada suatu proses mempengaruhi orang-orang agar mereka berpartisipasi dalam pencapaian tujuan organisasi, maka kepemimpinan menekankan pada seni atau proses mempengaruhi orang-orang supaya mereka berusaha keras secara sukarela dan antusias untuk mencapai tujuan organisasi.

Apa yang menjadi tolok ukur untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau tingkah laku ? Menurut Bertens (2000) setidaknya-tidaknya dapat disebut tiga macam tolok ukur :hati nurani, kaidah emas, penilaian masyarakat umum.

- a. **Hati nurani.** Suatu perbuatan adalah baik, jika dilakukan sesuai dengan hati nurani, dan suatu perbuatan lain adalah buruk, jika dilakukan bertentangan dengan suara hati nurani.
- b. **Kaidah emas.** Cara lebih obyektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral adalah mengukurnya dengan Kaidah Emas yang berbunyi:”Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Bila dirumuskan secara negatif, Kaidah Emas berbunyi :”janganlah melakukan terhadap orang lain apa yang Anda sendiri tidak ingin dilakukan terhadap diri Anda”.
- c. **Penilaian umum.** Cara ketiga dan barangkali paling ampuh untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku adalah menyerahkannya kepada umum untuk dinilai. Cara ini bisa disebut juga ”audit sosial”.

Menurut Musakabe (2000) Moralitas seorang pemimpin diibaratkan dengan filosofi cermin. Cermin adalah simbol gambaran obyektif dan sikap introspeksi diri yang harus dimiliki seorang pemimpin, tanpa cermin seseorang tidak dapat melihat kekurangannya sendiri. Sebagai seorang pemimpin, ia harus selalu menyadari kekurangan dirinya sendiri dan siap untuk memperbaiki.

Etika Profesi. Etika adalah penyelidikan filsafat tentang bidang yang mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang baik dan yang buruk. Bidang itulah yang kita sebut bidang moral. Maka etika didefinisikan sebagai filsafat tentang bidang moral. Etika mempersoalkan bagaimana ia harus bertindak. Etika adalah filsafat tentang praxis manusia. Dengan demikian etika dapat mengantarkan orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional, untuk membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya sendiri. Etika menyanggupkan orang untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma, baik norma-norma tradisi maupun norma-norma lain. Sekaligus etika membantu manusia untuk menjadi lebih otonom (Magnis-Suseno, Franz. 1979)

Apakah itu sebuah **profesi** dan apa yang membedakannya dari pekerjaan pada umumnya? Dengan profesi dimaksud dengan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi perbedaan antara profesi dan pekerjaan pada umumnya ialah bahwa profesi memiliki keahlian yang khas. Tentu garis pemisah antara pekerjaan biasa dan profesi tidak dapat ditarik dengan tajam (Magnis-Suseno, Franz. 1996)

Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Dengan demikian orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan penuh waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu. Dengan kata lain, orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan karena ahli di bidang tersebut dan meluangkan seluruh waktu, tenaga dan perhatiannya untuk pekerjaan tersebut.

Namun ini saja tidak cukup. Orang yang profesional adalah orang yang mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu. Ia melibatkan seluruh dirinya dan dengan giat, tekun, dan serius menjalankan pekerjaannya itu. Karena, dia sadar dan yakin bahwa pekerjaannya telah menyatu dengan dirinya. Pekerjaannya itu membentuk identitas dan kematangan dirinya, dan karena itu dirinya berkembang bersama dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaannya itu. Ia tidak lagi sekadar menjalankan pekerjaannya sebagai hobi, sekadar mengisi waktu luang atau secara asal-asalan. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan mendalam atas pekerjaannya itu (Keraf, A. Sonny 1998)

Standar moral etika kepemimpinan. Standar moral adalah suatu alat 'pengendali' bagi perilaku individu atau kelompok individu dalam hubungannya dengan individu atau kelompok individu lain. Standar moral ini akan 'memutuskan' perilaku individu atau kelompok individu apa yang bisa dibenarkan atau disalahkan secara moral. Jadi standar moral berfungsi 'menjaga' keharmonisan hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok individu, atau antar kelompok individu.

Fungsi standar moral sebagai penjaga keharmonisan hubungan manusia dalam suatu komunitas masyarakat memang sangat diperlukan sebagai konsekuensi logis sifat dasar manusia yang selalu ingin berinteraksi dengan manusia lain. Walaupun begitu ada saja manusia yang melakukan kegiatan yang dianggap menyeleweng dari standar moral yang sudah ada. Banyak alasan mengapa ada saja manusia yang menyeleweng dari standar moral yang sudah ada, misalnya karena manusia ingin mencapai tujuannya dengan lebih mudah tanpa

harus 'mentaati' standar moral atau karena kelemahan standar moral tadi sehingga banyak 'celah' yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan sendiri.

Salah satu fungsi manajemen yang sangat berperan menentukan etika bisnis suatu organisasi adalah fungsi pengarahan (*leading*). Menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo (1995), pengarahan merupakan aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan.

Strategi Pengembangan Fundamental Ekonomi Daerah. Secara umum, **pembangunan ekonomi daerah** adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blackely, 1989, dalam Nagel, 2011) Tentu saja makna pembangunan daerah tersebut amat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah itu. Bagaimana daerah mengatasi masalah fundamental yang dihadapi ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih. Dalam konteks inilah pentingnya merumuskan visi dan misi, kemudian memilih strategi yang tepat.

Teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan di sini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan baru ini disajikan pada tabel berikut ini:

Pendekatan dan Konsep Baru dalam Pembangunan (Kuncoro, Mudrajad, 2004)

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber daya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan dan inovasi sebagai penggerak ekonomi

Platform pemasaran daerah. Secara umum memasarkan daerah berarti mendesain suatu daerah agar mampu memenuhi dan memuaskan keinginan dan ekspektasi dari target pasarnya. Siapa target pasar suatu daerah? Yang *pertama*, tentu saja penduduk dan masyarakat daerah tersebut yang membutuhkan layanan publik yang memadai. *Kedua*, adalah apa yang saya sebut TTI (*traders, tourists, investors*) baik dari dalam maupun dari luar daerah. *Ketiga*, adalah TDO *talents* (SDM berkualitas), *developers* (pengembang), *organizers* (pengorganisir *event*), dan seluruh pihak yang memiliki kontribusi dalam membangun keunggulan bersaing

daerah. Membangun keunggulan bersaing daerah, menurut Michael Porter, tidak lain adalah upaya meningkatkan produktivitas (nilai *output* yang dihasilkan per unit *input* yang digunakan) yang pada gilirannya akan menaikkan kualitas dan standard hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dasar pemikiran dari model ini adalah upaya menarik sumber daya yang terbaik baik dari dalam maupun luar daerah (nasional maupun global) sebagai landasan bagi daerah untuk memacu produktivitasnya.

Secara garis besar, model ini berisi tiga langkah strategis. *Pertama*, menjadi tuan rumah yang baik (*be a good host*) bagi target pasar daerah. *Kedua*, memperlakukan mereka secara semestinya (*treat your guest properly*). Dan *ketiga*, membangun sebuah “rumah” yang nyaman bagi mereka (*building a home sweet home*). Langkah strategis pertama merupakan upaya penarikan target pasar (*customer acquisition*); yang kedua, pemuasan (*customer satisfaction*); dan langkah ketiga merupakan upaya mempertahankan target market (*customer retention*) (Kartajaya, Hermawan, 2002).

KESIMPULAN

Perlu dirancang berbagai program peningkatan kreatifitas karyawan untuk mendorong organisasi yang inovatif. Kreatifitas dan inovasi memang mengacu pada dua pengertian yang berbeda, jika kreatifitas berhubungan dengan segala aktifitas yang membangkitkan timbulnya gagasan atau ide baru, maka inovasi lebih ke arah implementasi dari pembangkitan gagasan bisnis yang terus berlangsung sehingga menghasilkan budaya kreatif organisasi. Perbedaan lainnya kreatifitas lebih merujuk pada faktor individu dan berpikir, sedangkan inovasi lebih mengarah pada orang banyak dan apa yang harus dilakukan (menuangkan gagasan dalam tindakan atau implementasi). Cara lain untuk menumbuhkan organisasi yang inovatif adalah dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pengembangan SDM bagi para karyawan.

Pemimpin dituntut untuk dapat menciptakan program formal yang dapat memberikan semangat bagi para karyawannya untuk berinovasi dan berkreasi secara optimal. Hal ini untuk menjadikan perusahaan agar memiliki daya saing. Pelatihan dan pengembangan memang tidak cukup, namun lebih dari itu pihak manajemen dituntut untuk menumbuhkan komitmen untuk membuka babak transparansi demi tumbuhnya semangat kreativitas dan inovasi.

Dalam pengelolaan kota, fungsi etika untuk kebaikan bersama. Antar kita harus saling berbuat (*in action*) dan berpikir yang baik. Yang kita lakukan , baik Gubernur, Staff Gubernuran, maupun Rakyat harus dilandasi atau diwarnai demi kebaikan bersama (*public good*). Pemimpin menjadi model etika (*ing ngarso sung tulodo*) tokoh yang bisa diteladani.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Abdul Rochim.2002.*Membangkitkan Semangat Kreativitas dan Inovasi Karyawan* dalam majalah Manajemen dan Eksekutif no. 162 Februari 2002.

Bertens, K. 2001. *Perpektif Etika Esai-Esai Tentang Masalah Aktual*. Yogyakarta: Kanisius.

Bertens, K. 2003. *Keperihatinan Moral*, Yogyakarta: Kanisius.

Bertens, K. 2009. *Perpektif Etika Baru 55 Esai Tentang Masalah Aktual*. Yogyakarta : Kanisius.

- Dharmmesta, Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo. 1995. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Ernawan, Erni. 2007. *Business Ethics*. Bandung : Alfabeta.
- Hart, Michael H. 1997. *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Jennifer Lee dan William Ng. 2010. *Integritas dan Etika Dalam Bisnis*. Majalah SME & Entrepreneurship Magazine Edisi Indonesia Oktober 2010.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Kertajaya, Hermawan. 2002. *Memasarkan Daerah Sebuah Platform Pengembangan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kompas, 1 – 9 – 2011
- Kompas, 27 – 10 - 2011
- Kompas, 22 – 8 – 2011
- Koontz, Harold and Heinz Weihrich. 1990. *Essentials of Management*. New York: McGraw-Hill Publishing Company.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Bagaimana Menarik Investasi dan Memasarkan Daerah?*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Magnis-Suseno, Franz. 1988. *Etika Dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta : Kanisius.
- Magnis-Suseno, Franz. 1996. *Etika Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Musakabe, Herman. 2001. *Pemimpin dan Krisis Multidimensi Etika dan Moralitas Kepemimpinan*. Kupang : Yayasan Citra Insan Pembaru.
- Nagel, P. Julius F. 2011. *Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Menggunakan Budaya Entrepreneurial*. dalam Proceeding Soft Skill and Character Building Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2011 ISSN: 2087-8672.
- Sri-Edi Suwasono. 2007. *Sistem Ekonomi Nasional untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*. Jatim: Forum Intelektual 45 Jatim DHD 45 Jatim Legiun Veteran RI Jatim.

Yuniarto. 2000. *Standard Moral Dalam Etika Kepemimpinan*, Jurnal ANTISIPASI Vol.4 No.1 Tahun 2000.